

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar (Studi Di Kecamatan Kuok)

Muhammad Fadhil¹, Khotami²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* fadhilmhd836@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana program pemberdayaan usaha mikro kecil oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar khususnya di kecamatan Kuok dan faktor penghambatnya. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Dimana penelitian ini langsung ke kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dan di kecamatan Kuok agar dapat fenomena yang ada berdasarkan fakta yang bersifat actual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian yaitu teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Tim Delivery (2004), dalam Mardikanto (2013:125) dengan 4 indikator yaitu Seleksi Lokasi, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat, Proses Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemandirian Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kurang optimalnya sosialisasi dalam penyampaian informasi mengenai bentuk pemberdayaan seperti pelatihan umk kepada pelaku usaha lainnya serta belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar kepada pelaku usaha binaan seperti perizinan, pemasaran, dan pameran atau event.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Pelatihan, Pembinaan

Abstract

This research was conducted to find out how the micro and small business empowerment program by the Department of Trade, Cooperatives and Micro and Small Enterprises of Kampar Regency, especially in the Kuok sub-district and the inhibiting factors. This type of research is a qualitative research with descriptive character. Where this research goes directly to the Office of Trade, Cooperatives and Micro and Small Enterprises in Kampar Regency and in Kuok sub-district so that existing phenomena can be based on actual facts when researching using the type of research, namely interview, observation, and documentation data collection techniques. This study uses the theory of Empowerment of the Delivery Team (2004), in Mardikanto (2013:125) with 4 indicators, namely Location Selection, Socialization of Community Empowerment, Community Empowerment Process, and Community Self-reliance. Based on the results of this study, it can be concluded that socialization is not optimal in delivering information about forms of empowerment such as MSE training to other business actors and not optimal coaching carried out by the Department of Trade, Cooperatives and Micro and Small Businesses of Kampar Regency to fostered business actors such as licensing, marketing, and exhibitions or events.

Keywords : Empowerment, Training, Construction

PENDAHULUAN

Penetapan peraturan yang didasarkan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi. Kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah berhak untuk melaksanakan segala urusannya dengan seluas-luasnya, dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada.

Untuk menjalankan tugas tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.

Sebagai salah satu bangsa yang sedang berkembang, bangsa Indonesia sedang giat-giatnya mengejar ketertinggalan di segala bidang. Salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalannya yaitu salah satunya dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi dan industri. Pemerintah tentunya telah menyadari akan pentingnya pengembangan kegiatan UMKM yang dianggap bisa menjadi salah satu alternatif penting yang mampu membantu perekonomian nasional dan daerah saat ini. Hal ini karena UMKM adalah langkah awal perwujudan kewirausahaan yang terbentuk dan menjadi salah satu kegiatan usaha dominan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Beberapa tahun belakang dunia dan Indonesia telah terkena dampak pandemi covid-19 yang membuat segala sektor ambruk, terkhusus lagi sektor UMKM yang ada di Indonesia. Tapi tentunya pemerintah saat ini membuat beberapa kebijakan demi pemulihan ekonomi secara bertahap. Beberapa hal yang menjadi upaya pemulihan ekonomi bagi UMKM yang terdampak Covid-19 di Provinsi Riau seperti melakukan peningkatan pembinaan dan Pemberdayaan UMKM melalui online atau daring.

Dan Kecamatan Kuok adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sebelum dinamai Kecamatan Kuok, dulunya lebih dikenal dengan sebutan kecamatan Bangkinang Barat. Dan ibukota kecamatan Kuok adalah Kuok. Kecamatan Kuok terdiri dari 9 desa diantaranya Kuok, Merangin, Empat Balai, Pulau Jambu, Bukit Melintang, Lereng, Pulau Terap, Batu langkah Kecil, dan Silam. Luas Wilayah Kecamatan Kuok yaitu 412,88 Km².

Beberapa program pemberdayaan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar beberapa diantaranya yaitu IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) dan Pelatihan UMK untuk para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis usahanya. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar adalah makna dari kesejahteraan dalam memandirikan para pelaku usaha UMK dengan program Dinas tersebut.

Maka dari itu Pemberdayaan merupakan upaya program pemerintah dalam meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat luas yang dalam kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan. Dalam arti masyarakat disini merupakan pelaku usaha UMK.

Tabel 1. Pertumbuhan UMK (Usaha Mikro Kecil) dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) Kecamatan Kuok Tahun 2019-2020

No	UMK	2019	2020
1	Jumlah Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Kuok	256	417
2	Jumlah IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) Kecamatan Kuok	17	6

Sumber : LKJ Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar 2021

Dilihat dari Tabel 1. diatas, maka pertumbuhan usaha mikro kecil pada tahun 2019-2020, Pertumbuhannya cukup lumayan. Tetapi dari segi IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) sangat sedikit para pelaku usaha yang telah memiliki Izin dibandingkan jumlah pertumbuhan UMK nya. Data 2019 ke 2020 menunjukkan adanya penurunan IUMK (Izin Usaha Mikro kecil), yang sebelumnya tahun 2019 berjumlah 17 menjadi 6 orang pada tahun 2020. Itu dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat atau para pelaku usaha mengenai IUMK tersebut.

Tabel 2. Data Pelatihan UMK dari Beberapa Kecamatan tahun 2020-2021

Nomor	Kecamatan	2020	2021	Jumlah
1	Koto Kampar Hulu	2	-	2
2	XII Koto kampar	6	5	11
3	Kuok	8	-	8
4	Salo	2	1	3
5	Bangkinang Kota	42	30	72
6	Bangkinang	10	7	17
7	Tapung	2	15	17
8	Tapung Hulu	1	-	1
9	Tapung Hilir	-	2	2
10	Kampar Utara	7	7	14
11	Rumbio Jaya	8	4	12
12	Kampar	14	15	29
13	Kampa	3	13	16
14	Tambang	6	17	23
15	Siak Hulu	1	6	7
16	Kampar Kiri	1	-	1
Total		113	122	235

Sumber : LKJ Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar 2021

Jika dilihat dari tabel 2. diatas, maka ada beberapa kecamatan para pelaku umkm yang tidak mendapatkan pelatihan Usaha Mikro Kecil (UMK) dari Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Kabuapten Kampar pada tahun 2021 diantaranya kecamatan Koto Kampar Hulu, Kuok, Tapung Hulu, dan Kampar Kiri. Sesuai dengan lokasi penelitian bagi peneliti yaitu kecamatan kuok, maka tahun 2020 ada 8 orang yang mendapatkan pelatihan usaha dan sedangkan pada tahun 2021 tidak ada satu pun pelaku usaha dari kecamatan Kuok yang mendapatkan pelatihan.

Adapun bentuk pelatihan usaha untuk para Pelaku UMK oleh Dinas perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar adalah berupa pelatihan legalitas meningkatkan kerja sama, menambah link-link kerjasama, dan motivasi. Yang mana pelatihan tersebut biasanya diselenggarakan selama 3 hari atau 1 hari. Yang mana pelatihan tersebut di setarakan bentuk pelatihannya walaupun jenis usahanya berbeda.

Tabel 3. Jenis Usaha Masyarakat Kuok Yang Mengikuti Pelatihan UMK dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil pada tahun 2020

No	Pelaku Usaha	Nama Usaha	Alamat	Jenis
1	M. Haikal	Sablon Kaos	Kuok	Industri
2	Husni Marti	Makanan Cemilan	Kuok	Industri
3	Batri	Kerajinan Tangan	Kuok	Industi

No	Pelaku Usaha	Nama Usaha	Alamat	Jenis
4	Nurhayati	Oncu Snack (Mr. Maco)	Kuok	Industri
5	Kamirul adli	Slai Jeruk Kuok	Kuok	Industri
6	Ines Amalia Dinata	Slad Buah Jeje	Kuok	Industri
7	Mahyudi	Usaha Kue Rumahan	Kuok	Industri
8	Darna	Anyaman Bambu	Kuok	Industri

LKJ Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar 2021

Dilihat dari tabel 3, maka jenis usaha yang mendapatkan pelatihan UMK tahun 2020 yaitu jenis usaha industri. Dimana kategori industrinya ada 2, yaitu industri pengrajin berupa sablon kaos, kerajinan kayu (miniatur kayu), dan Anyaman bambu sedangkan industri makanan berupa Oncu Snack (Mr. Maco), Slai Jeruk, Slad Buah Jeje, Makanan Cemilan, dan Usaha Kue Rumahan.

Tabel 4. Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar Tahun 2017-2020

Tahun	Anggaran APBD Murni	Anggaran APBD Perubahan	Selisih
2019	369.250.700	369.250.700	-
2020	347.275.000	208.003.147	139.271.826

Sumber: LKJ Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar 2021

Jadi dilihat dari Tabel 4 diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya anggaran pada tahun 2020 membuat anggaran perubahan yang besar dari anggaran rencana yang dipangkas menjadi senilai Rp.139.271.826

Tabel 5. Anggaran Dinas Perdagangan dan UMK Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kegiatan	Anggaran APBD Murni	Anggaran APBD Perubahan	Selisih
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	239.792.961	236.102.961	3.690.000
Program Pengembangan UMKM	482.480.875	18.397.263	464.083.612

Sumber: LKJ Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar 2021

Tabel 5, maka dapat disimpulkan bahwasanya anggaran pada tahun 2021 terjadi perubahan anggaran yang besar dipangkas senilai Rp. 464.083.612 pada Program Pengembangan UMKM.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Tujuan kegiatan pengembangan dan pembinaan ini adalah untuk menciptakan masyarakat atau SDM yang berkualitas serta membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Untuk mewujudkan suatu pemberdayaan secara baik, peran pemerintah itu sendiri memiliki dampak yang begitu besar dan signifikan dalam mensukseskan tujuan dari kesejahteraan UMK di daerah. Dimana saat ini, UMK khususnya di kecamatan Kuok, masih

berkembang. Dan mengenai soal UMK yang mendapatkan pelatihan, tentunya mereka mendapatkan suatu informasi mengenai program-program yang ada dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Tapi kenyataan yang ada saat ini, kebanyakan masyarakat di kecamatan Kuok tersebut tidak mengetahui informasi tentang program-program dari pemerintah untuk pelaku UMK itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial.

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep dan fenomena sosial, masalah sosial, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana mengingat data yang diperlukandalam penelitian ini berupa dokumen, catatan dan data-data yang merujuk kepada kualitatif.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dikarenakan karena penulis menemukan ada beberapa fenomena yang mengindikasikan bahwa terdapat kurangnya pemberdayaan UMK di kecamatan Kuok seperti Kurangnya informasi dan sosialisasi bagi pelaku umk dalam bentuk program-program pemberdayaan yaitu salah satunya pelatihan usaha bagi pelaku UMK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan analisis pemberdayaan ini, akan diuraikan hasil penelitian tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar di Kecamatan Kuok. Penelitian ini memfokuskan pada Pemberdayaan Pelaku Usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Kuok sesuai dengan Program Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar yaitu Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk pelaku usaha. Yang mana bertujuan untuk memandirikan pelaku usaha terkait usaha yang mereka punya.

Permasalahannya yaitu dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro kecil Kabupaten Kampar ditemukannya kurang pemberdayaan, sosialisasi serta penyampaian informasi terkait dengan adanya program-program dari Dinas seperti IUMK (Izin Usaha Mikro kecil) dan Pelatihan kewirausahaan UMK untuk para pelaku usaha. Dari data yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara dengan informan, maka dari itu penulis akan menguraikan hasil wawancara dalam bentuk uraian mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar di Kecamatan Kuok.

Maka dari itu, Berikut ini dijelaskan hasil respon maupun tanggapan terhadap indikator penelitian. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan suatu wawancara terhadap 1 key iinforman dan 8 informan yaitu Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro kecil Kabupaten Kampar, Kepala Bidang Pemberdayaan UMK, Kepala Seksi Pemberdayaan Pengembangan, Promosi dan Peluang Usaha Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten kampar, Pegawai Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Miro Kecil Kabupaten Kampar, 2 pelaku usaha yang mengikuti pelatihan serta 2 pelaku usaha yang tidak mengikuti pelatihan usaha.

Maka untuk melihat dan mengetahuinya dapat dikemukakan indikator sebagai berikut:

1. Seleksi Lokasi

Yaitu Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan mengenai indikator yang Pertama yaitu Seleksi Lokasi bahwa untuk indikator seleksi lokasi pemberdayaan mengenai tempat lokasi pemberdayaan UMK tersebut seperti pelatihan UMK itu dilaksanakannya di ballroom hotel. Disitu pelaku usaha dibekali ilmu mengenai bagaimana cara mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik.

2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Adalah upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan mengenai indikator yang kedua yaitu Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat bahwa untuk Untuk indikator sosialisasi pemberdayaan masyarakat yaitu bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas sangat kurang sehingga pelaku usaha lainnya tidak mengetahui beberapa program UMK yang dilakukan oleh Dinas. Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses tahap pemberdayaan menghasilkan suatu kemampuan dan kemandirian bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Berdasarkan hasil observasi wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan mengenai indikator yang ketiga yaitu Proses Pemberdayaan Masyarakat bahwa untuk indikator proses pemberdayaan bahwa setelah pelatihan UMK tersebut, peserta pelatihan otomatis menjadi bagian binaan Dinas dan juga pasti akan dilakukannya pembinaan secara berkala. Tetapi dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pembinaan yang dilakukan belum terealisasi semuanya dan bahkan tidak dilakukannya sama sekali pembinaan tersebut. Dari 2 peserta pelatihan yang peneliti yang wawancara cuman 1 orang yang dapat pembinaan dari Dinas, itu pun binaan didalam pameran atau event-event yang ada di daerah.

4. Pemandirian Masyarakat

Tentunya dari proses tahap pemberdayaan menghasilkan suatu kemampuan dan kemandirian bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. yang sehingga bisa berkesinambungan terhadap usahanya dan menghasilkan finansial yang lebih. Dan arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Berdasarkan hasil observasi wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan mengenai indikator yang keempat yaitu Pemandirian Masyarakat bahwa untuk indkator pemandirian masyarakat dapat disimpulkan bahwa kemandirian pastinya harus dicipta dan dimiliki oleh setiap pelaku usaha setelah dilakukannya pemberdayaan UMK tentunya perlu adanya pemantauan proses maupun pembinaan setelah mendapatkan pelatihan. Tapi itu tidak terealisasi seluruhnya. Maka evaluasi kedepannya yang harus dilakukan oleh Dinas yaitu yaitu bagaimana cara mengetahui kondisi maupun kendala yang ada pada pelaku usaha dan bisa dicarikan solusi seterusnya.

Hambatan-Hambatan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Studi di Kecamatan Kuok.

1. Anggaran pemberdayaan UMK di Kabupaten Kampar masih minim, karna itu Dinas hanya mementingkan skala prioritas saja. Sehingga yang mengakibatkan belum

meratanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan dan pembinaan UMK yang ada, khususnya di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

2. Kurangnya optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas sehingga bentuk kegiatan pemberdayaan UMK seperti pelatihan, pembinaan, IUMK, dan bantuan modal usaha tidak sampai kepada pelaku usaha lainnya.
3. Sarana dan prasarana pemberdayaan yang masih minim yang mengakibatkan belum efektifnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan.
4. Kurangnya pemantauan proses serta *follow up* (menindaklanjuti) pembinaan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar kepada pelaku usaha sehingga perkembangan dan juga kendala pelaku usaha tidak tahu oleh Dinas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar (Studi kasus di Kecamatan Kuok) maka penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis wawancara penelitian serta observasi tentang Pemberdayaan Usaha Mikro kecil oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar yang khususnya di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar masih banyak kekurangan-kekurangan dalam kegiatan serta evaluasi pemberdayaan UMK tersebut.
2. Hambatan yang terjadi dalam kegiatan pemberdayaan UMK kepada pelaku usaha UMK adalah belum meratanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar kepada pelaku usaha UMK.
3. Kurangnya Informasi kepada pelaku usaha UMK mengenai Bentuk-bentuk pemberdayaan UMK yang dilakukan oleh Dinas sehingga pelatihan UMK, pembinaan UMK seperti pemasaran, perizinan, pameran atau event bazar, serta bantuan modal tidak tahu sama sekali oleh pelaku usaha lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengalokasikan anggaran yang cukup dalam kegiatan pemberdayaan di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Kampar.
2. Diharapkan membangun sarana dan prasarana pemberdayaan yang sangat memadai dan dibutuhkan oleh pelaku usaha khususnya di Kecamatan Kuok.
3. Diharapkan kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar melakukan *follow up* (menindaklanjuti) terutama dalam pembinaan bagi yang telah melakukan pelatihan sehingga Dinas tersebut bisa mengetahui apa yang dibutuhkan serta kendala-kendala yang ada pada pelaku usaha UMK.
4. Diharapkan kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas lagi untuk menyampaikan apa-apa saja bentuk pemberdayaan UMK terhadap pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aina Florita, J. d. (2018). Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Dinas koperasi dan UMKM Kota Padang. *JMIAP: Jurnal Administrasi Publik*, 143-153.
- Ali, F. d. (2014). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama .
- Anggraini, N. d. (2011). Kajian Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kebakaran Hutan Dan Deforestasi Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Penginderaan*.
- Ardhana, G. P. (2016). Dampak Laju Deforestasi Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati Indonesia. *DOAJ*.
- Bappenas. (2014). *Kajian Terhadap Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan* . Jakarta.
- Damaraya, A. d. (2019). *Deforestasi Indonesia Tahun 2017-2018*. Jakarta : Direktora Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Alam.
- Djaenudin, D. d. (2018). Analisis Peluang Keberhasilan Penurunan Laju deforestasi : Pendekatan teori Transisi hutan. *JPEsk*.
- dkk, M. (2015). Peranan Kebijakan Negara Terhadap perlindungan Hutan Untuk Menekan Laju Deforestasi Taman Nasional Teso Nilo. *JOM Faperta*.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjadara University Press .
- Hartomo, A. A. (2004). *Ilmu Sosial Dasar* . Jakarta : Bumi Aksara.
- Kaho, J. R. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kanninen, M. d. (2009). *Apakah Hutan Dapat Tumbuh Di Atas Uang? Implikasi Penelitian Deforestasi Bagi Kebijakan Yang Mendukung REED*. Bogor : CIFOR .
- Kansil, C. (2003). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kharisma, D. (n.d.). *Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tnada daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan pariwisata Kota Semarang*.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan* . Jakarta : Rajawali Pres .
- Mardikanto, T. &. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam persepektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, T. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Miftah, T. (2011). *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Jakarta : kencana. .
- Mutolib, A. Y. (2019). Faktor Penarik Dan Pendorong Deforestasi Hutan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. *Journal Of Tropical Upland Resources*.

- Nawawi, I. (2009). *Publik Policy, Analisis Strategis advikasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Ndaha, T. (2011). *Keybernology 2*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Ndraha, T. (2015). *Kybernoligy (ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2012). *Publik Policy*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Nurjannah, S. (2014). Efektivitas Pelaksanaan program PengembanganKewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru. 1-19.
- (n.d.). *Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar*.
- Redi, A. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta : Sina Grafika .
- Rusadi Sylvina, Y. N. (2021). Perinsip Good Enviromental Governance oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Studi Kasus Kebakaran Lahan Gambut Di Kecamatan Dayun.Riau . *Jurnal Niara*.
- Salim. (2004). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Shafitri, D. d. (2018). Analisis Deforestasi Hutan Di Provinsi Riau Dengan Metode Polarimetrik Dalam Pengidraan Jauh. *Jurnal Geodesi Undip*.
- Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014*. (2014). Pekanbaru : Dinas Kehutanan Provinsi Riau .
- Suharto, E. (2010). *Analisis Kebijakan Publik panduan Praktis Mengakaji Masalah dan kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi UMKM (Usaha Mikro kecil dan Menengah)*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Sukardi. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kopetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara .
- Supriyadi, E. B. (2014). *Hukum Agraria Kehutanan*. Jakarta: Rajawali Pres .
- Suryana, Y. d. (2010). *Kewirausahaan*. Bandung: Prenadamedia Group.
- Suyanto, d. S. (2010). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta: Kencana.
- Suyono, H. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafiie, K. I. (2010). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama .

Theresia, A. d. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat (Cetakan Kedua)*. Bandung: Alfabeta.

(n.d.). *Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah* .

(n.d.). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.

Wahab, A. S. (2014). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* . Jakarta : Bumi Aksara.

Wahab, S. a. (2010). *Analisi Kebijakan Dari Formulasi ke Implemntasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyuni, Y. (2016). *Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011- 2012*. *JOM Fisip Unri*.

Yusuf, A. M. (n.d.). *Hukum Kehutanan Di Indonesia* . Jakarta : Rineka Cipta .

Zain, A. S. (1998). *Aspek Pembinaan hutan Dan Stratifikasi Hutan rakyat*. Jakarta : Rineka Cipta.

Zaini Ali, R. I. (n.d.). *Teori kebijakan Publik*. pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing.